



# Bimbingan teknis pelaporan dana kampanye berdasarkan Akuntansi Dana Kampanye PKPU 24 tahun 2018

Samirah Dunakhir<sup>1</sup>, Nur Afiah<sup>2</sup>, Warka Syachbrani<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar

**Abstract.** This is Training for Political Party personnel. This training aims to socialized about cost of campaign in Makassar. Training based on the Election Commission Regulation (PKPU) Number 24 of 2018 regarding Election Campaign Funds requires that every use of campaign funds be audited by a Public Accountant. This Community Partnership Program Proposal Team has a background in Financial Accounting and Public Sector Accounting. This background is very suitable and supports the implementation of the proposed program topic. Meanwhile, the budgeted funds for implementing this program are sourced from PNPB Universitas Negeri Makassar with an implementation period of eight months. Outputs generated through this program include: publication in print / online media; increasing the competitiveness of human resources; increase in the application of science and technology.

**Keywords:** campaign funds accounting, election 2019

## I. PENDAHULUAN

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga di definisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setujuan di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, KPU mengharuskan peserta pemilu beserta partai politik untuk bertanggung jawab dalam pembuatan laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye itu meliputi laporan awal dana kampanye, sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye. Pada pemilu presiden (Pilpres), laporan dana kampanye dibuat oleh tim kampanye, namun dipertanggungjawabkan oleh pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).

Sedangkan, untuk pemilu anggota DPD, laporan dana kampanye dibuat oleh masing-masing calon anggota DPD. Sementara untuk pemilu anggota DPR dan DPRD, laporan dana kampanye dibuat oleh partai politik peserta pemilu, bukan oleh calon legislatif (Caleg). Namun, dikarenakan sumbangan dana

kampanye seringkali diberikan langsung ke caleg, KPU meminta tiap caleg untuk menginformasikan penerimaan dan pengeluaran kampanyenya ke parpol.

Hal yang paling penting, seluruh sumbangan dana kampanye yang masuk harus dicatat sumbernya. Termasuk dicatat penggunaan dan pengeluaran belanjanya. Pencatatan tersebut, meliputi seluruh kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye (Farisa, 2018).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak awal sangat konsen dengan proses politik di negeri ini melalui partisipasi di bidang audit laporan keuangan partai politik. Wujud dari partisipasi tersebut antara lain dengan membuat pedoman pelaksanaan audit atas laporan keuangan partai politik maupun laporan dana kampanye.

Selama ini IAI telah pro aktif melakukan berbagai upaya agar tercipta transparansi dan akuntabilitas berkaitan dengan keuangan partai. Langkah yang ditempuh antara lain IAI melakukan sosialisasi ke berbagai pihak yang terkait antara lain DPR dan DPD. Namun demikian hasilnya belum memuaskan, terbukti hanya sedikit partai yang melaksanakan amanat UU dengan membuat Laporan Keuangan Partai dan Laporan Dana Kampanye.

IAI juga merekomendasikan segenap aktivitas yang berkaitan dengan audit keuangan parpol secara terperinci, mulai dari penyusunan petunjuk pelaksanaan tata administrasi keuangan partai dan peserta pemilu, penyusunan pedoman sistem akuntansi keuangan parpol, penyusunan panduan audit laporan keuangan partai politik sampai kepada kegiatan press release dilaksanakan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pelaporan Dana Kampanye Berdasarkan Akuntansi Dana

Kampanye PKPU 24 Tahun 2018 ini adalah diharapkan agar: (1) Para pengurus dan pegawai partai politik dapat memahami proses pengelolaan Keuangan organisasi sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola dana kampanye dapat terlaksana dengan semestinya; (2) Para pengurus dan pegawai partai politik dapat mengetahui bagaimana mengelola keuangan sehingga dapat mewujudkan tata kelola keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif. Pada akhirnya, masyarakat mampu ikut tersejahterkan secara finansial dengan maksimalnya penerimaan yang tentunya berbuntut pada perbaikan pelayanan.

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pelaporan Dana Kampanye Berdasarkan Akuntansi Dana Kampanye PKPU 24 Tahun 2018 ini, diantaranya: (1) Para pengurus dan pegawai partai politik dapat memiliki keterampilan mengenai pengelolaan Keuangan Dasar, terutama pengelolaan keuangan organisasi publik; (2) Para pengurus dan pegawai partai politik dapat mandiri dalam menjalankan tugasnya dengan efisien dan efektif.



Gambar 1. Spanduk kegiatan PKM

## II. METODE PELAKSANAAN

Sebelum pelaksanaan kegiatan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pengurus dan pegawai partai politik, terlebih dahulu dilakukan pengidentifikasian masalah dan pemetaan calon peserta. Dari hasil pemetaan maka ditentukan metode yang akan digunakan dalam pelatihan ini meliputi: Metode Pelatihan; Diskusi; Tanya jawab; Pemberian tugas; dan Latihan penatabukuan Keuangan sederhana.

Tim Pengusul Program Kemitraan Masyarakat ini memiliki latar belakang Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen. Latar belakang ini sangat sesuai dan mendukung pelaksanaan topik program yang diajukan. Pelaksana kegiatan adalah Tim Program IPTEK bagi Masyarakat dari Universitas Negeri Makassar. Ketua dan anggota tim merupakan dosen pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Latar belakang keilmuan ketua dan anggota tim sangat relevan dengan materi yang akan disampaikan pada kegiatan pelatihan ini.

Ketua tim adalah Ibu Samirah Dunakhir, S.E., M.Bus., Ph.D., Ak., CA., yang merupakan dosen

pengajar sekaligus sebagai Ketua Program Studi Akuntansi FE UNM. Beliau disetiap tahun akademik mengampu mata kuliah Akuntansi seperti; Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan, Analisis Laporan Keuangan, dan sebagainya.

Sedangkan, anggota tim seperti Ibu Nur Afiah, S.E., M.Si., Ak., CA. dan Bapak Warka Syachbrani, SE., M.Sc., Ak., CA., yang merupakan dosen pada Program Studi Akuntansi FE UNM. Jenjang pendidikan masing-masing adalah Akuntansi yang sangat sesuai dengan topik pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan masyarakat.

Cara mengukur dan mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan pelaksanaan pelatihan ini, maka dilakukan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dan sekaligus untuk dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Adapun indikator yang dijadikan tolok-ukur penilaian/evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah: (1) Kemampuan peserta memahami materi yang diberikan; (2) Kemampuan peserta pelatihan di dalam mengelola data serta menganalisa sehingga menjadi informasi yang berguna; dan (3) Kedisiplinan, partisipasi, antusias, dan motivasi peserta selama mengikuti pelatihan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Realisasi Penyelesaian Masalah

Pelatihan dapat dilaksanakan berhasil terlaksana dengan baik berkat kerjasama antara Tim Pelaksana Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar dengan mitra. Partisipasi mitra dalam hal ini diantaranya mendaftar dan mengkoordinir peserta yang ikut serta pelatihan, membantu fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pelatihan.

Dalam kegiatan pelatihan ini menggunakan alat dan bahan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini. Adapun alat yang digunakan berupa papan tulis, spindol, materi yang dibagikan kepada peserta, serta fasilitas ruangan yang digunakan untuk kegiatan pelatihan, sound system, LCD Proyektor, perangkat-perangkat lainnya yang dibutuhkan dalam proses pelatihan berlangsung. Bahan yang digunakan kertas HVS untuk dipakai catatan sementara sebelum dipindahkan ke note book yang diberikan kepada peserta pelatihan, kertas Kwarto untuk laporan penelitian, alat tulis menulis, serta tinta printer untuk penggandaan laporan.

### B. Mitra Sasaran

Mitra sasaran dalam kegiatan pelatihan ini adalah para pengurus dan pegawai Partai Keadilan Sejahtera

(PKS) Kota Makassar yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilihan peserta pelatihan dilakukan oleh pihak partai dengan koordinasi dari Tim Pelaksana Pelatihan. Adapun kriteria calon peserta yang digunakan dalam pelatihan ini adalah sebagai berikut: (1) Para pengurus aktif dan pegawai yang menangani keuangan partai; (2) Usia minimal 17 tahun, maksimal 50 tahun; (3) Pendidikan minimal lulusan SMA atau sederajat.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan

### C. Kegiatan dan Evaluasi

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi: Metode pelatihan, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas dan latihan penatabukuan keuangan sederhana. Cara mengukur dan mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan pelaksanaan pelatihan ini, maka perlu dilakukan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dan sekaligus untuk dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni: Tahap pertama: Pre-Test/Observasi, dilakukan pada tahap awal (sebelum peserta pelatihan diberikan materi pelatihan yang terdiri dari Definisi, ruang lingkup dan tujuan Pengelolaan Keuangan; Gambaran Umum Proses Pengelolaan. Evaluasi yang dilakukan pada tahap awal kegiatan dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau data mengenai kemampuan dasar yang dimiliki peserta tentang pengelolaan.

Tahap kedua, evaluasi dilakukan pada saat proses pelaksanaan kegiatan berlangsung dimana dilakukan simulasi dan Assessment, meliputi kegiatan pemilihan satu topik khusus, dilanjutkan Pendefinisian Pengelolaan Keuangan. Evaluasi yang dilakukan bersamaan pada saat proses kegiatan pelatihan berlangsung, yakni dengan cara melakukan pengamatan langsung. Tujuannya untuk mengetahui tingkat keaktifan dan partisipasi aktif peserta, kedisiplinan, antusias dan motivasi peserta.

Tahap ketiga: Post-Test, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan (setelah peserta pelatihan memperoleh materi), dengan membagi beberapa kelompok kecil berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing tempat Kerja para peserta, kemudian diberikan tugas menyelesaikan tugas secara mandiri sampai menghasilkan laporan masing-masing. Kegiatan dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana perubahan tingkat pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan ini.

Adapun indikator yang dijadikan tolok-ukur penilaian/evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan in: (1) kemampuan peserta memahami materi yang diberikan, (2) Kemampuan peserta pelatihan di dalam mengelola data serta menganalisa sehingga menjadi informasi yang berguna, dan (3) kedisiplinan, partisipasi, antusias, dan motivasi peserta selama mengikuti pelatihan.

Hari	Tanggal	Waktu	Kegiatan	Materi
Jumat	16 Maret 2019	08.00 – 11.00	Pelatihan Pengelolaan Keuangan	1. Gambaran Umum Manajemen Keuangan 2. Pengelolaan Keuangan Organisasi
Jumat	16 Maret 2019	14.00 – 17.00	Simulasi dan Assessment	Penyelesaian Studi
Sabtu	17 Maret 2019	08.00 – 12.00	Evaluasi dan Tindak Lanjut	Pembagian Kelompok dan Tugas Menyusun Rencana Keuangan
Sabtu	17 Maret 2019	13.00 – 17.00	Persentase dan Diskusi	Masing-masing mempersentasikan hasil

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Pelatihan Pelaporan Dana Kampanye Berdasarkan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 yang telah dilaksanakan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Secara keseluruhan, peserta pelatihan telah mengetahui proses pengelolaan Keuangan pada sebuah organisasi; (2) Dari 21 orang peserta pelatihan mencapai 80% sudah mampu menyusun Rencana Keuangan sesuai dengan kondisi tugasnya masing-masing; (3) Banyak pihak yang telah membantu dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan ini, yang memberikan bantuan dan partisipasinya dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat sampai penyelesaian laporan ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi yang telah memberikan hibah. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Rektor UNM atas arahan dan pembinaanya selama proses kegiatan Pengabdian Masyarakat berlangsung. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNM dan segenap mitra kegiatan yang telah memberi fasilitas, melakukan monitoring, dan mengevaluasi kegiatan PKM hingga selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farisa, F. Chusna. 2018. *Bedanya Cara Bertanggungjawaban Dana Kampanye di Pileg dan Pilpres*. Website <https://nasional.kompas.com/> diakses 29 Januari 2019.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.